

TESIS

HUBUNGAN KEKUASAAN PRESIDEN DENGAN PARLEMEN DI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENURUT KONSTITUSI DAN PRAKTEKNYA DITINJAU DARI KAJIAN POLITIK HUKUM



NAMA : CIPRIANO MARTINS LEMOS

NPM : 195202996/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : CIPRIANO MARTINS LEMOS
Nomor Mahasiswa : 195202996/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis : HUBUNGAN KEKUASAAN PRESIDEN DENGAN
PARLEMEN DI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR
LESTE MENURUT KONSTITUSI DAN PRAKTEKNYA
DI TINJAU DARI KAJIAN POLITIK HUKUM

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. G. Sri. Nurhartanto, S.H., LL.M.

11 Januari 2021

2. Dr. Hyronimus Rhity, S.H., LL.M.

11 Januari 2021



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : CIPRIANO MARTINS LEMOS
Nomor Mahasiswa : 195202996/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM TATA NEGARA
Judul Proposal Tesis : HUBUNGAN KEKUASAAN PRESIDEN DENGAN PARLEMEN DI
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENURUT
KONSTITUSI DAN PRAKTEKNYA DI TINJAU DARI KAJIAN
POLITIK HUKUM

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 18/01/2020

DEWAN PENGUJI NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA Dr. G. Sri. Nurhartanto, S.H., LL.M.

2. SEKRETARIS Dr. Hyronimus Rhity, S.H., LL.M

3. ANGGOTA Dr. Yohanes Triana, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cipriano Martin Lemos

NIM 195202996

Program Studi : Magister Ilmu Hukum ketatanegaraan

Judul Tesis : Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen Di Republik Demokratik Timor Leste Menurut Konstitusi Dan Prakteknya Di Tinjau Dari Kajian Politik Hukum. Menyatakan dengan sesungguhnya-sungguhnya serta sebenarnya bahwa tesis penelitian yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Yogyakarta..../. 2021



Cipriano Martins Lemos

MOTTO

Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap.

Mazmur 119:49

*Moris ne'e furak maibé oinsa maka hafurak iha ema seluk nia
matan*

**Hidup Itu Indah Tetapi Bagaimana Mengindakan Dimata
Orang Lain.**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan serta penyertaanNya sehingga penulis dapat melewati tahap demi tahap, mulai dari awal kuliah hingga kini telah sampai pada tahap akhir yakni penulisan karya ilmiah, penulis menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan maka semuanya akan sia-sia. Ketertarikan penulis untuk menulis tentang “Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste Menurut konstitusi dan prakteknya ditinjau dari kajian politik hukum” berangkat dari pemikiran bahwa negara yang baru merdeka pada Tahun 2002 dengan sistem pemerintahan Parlementer. Perkembangan negara yang baik melihat dari pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Berkaitan dengan kekuasaan yang ada dalam negara adalah kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga negara, oleh karena itu penulis ingin melihat khusus hubungan kekuasaan antara presiden dan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste, dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang timbul berapa tahun terakhir, terlebih khusus hubungan kekuasaan Presiden dan Parlemen. Dalam menyelesaikan penulisan ini penulis pun menyadari sungguh bahwa ada banyak orang-orang hebat yang rela bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Oleh karena itu dalam nada syukur dan terimah kasih yang luar biasa, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. G. Sri. Nurhartanto, S.H, LL.M selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat begitu luar biasa kepada saya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga kebaikan Bapak terhadap saya, dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha kuasa.

3. Dr. Hyronimus Rhity, S.H, LL.M selaku dosen pembimbing ke dua sekaligus ketua program studi ilmu hukum pasca sarjana Atmajaya Jogjakarta, yang selalu bersedia meluangkan waktu serta memberikan semangat, masukan serta motivasi yang begitu luarbiasa kepada saya dalam proses penulisan ini. Semoga kebaikan Bapak dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4. Dr. Yohanes Triana, S.H., M.Hum selaku Anggota/penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusun tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum UniversitasAtma Jaya Yogyakarta dan seruruh Civitas Akademik Program Pasca sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak/ibu di Aitarak Laran bagian kepresidenan dan di Parlemen Nasional di Dili Timor Leste yang telah membantu peneliti selama membuat penelitian untuk menjawab persoalan sesuai kebutuhan penulis terhadap tesis ini.
7. Bapak saya António Casimiro (Alm) dan ibuku tercinta Madalena Nobre, yang telah mendukung saya dengan tulus dan selalu hadir dalam situasi-situasi tertentu dan memberi motivasi, dorongan doa bagi penulis dalam perjalanan hidup penulis lebih khusus dalam proses tulis ini. Penulis minta maaf atas tutur kata dan tingkalaku yang kadang tidak sesuai dengan harapan bapa dan mama.
8. Kepada kakaku tersayang Ernesto Salsinha dan istrinya Jacinta da Costa Brites yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya, dukungan materil dan moral telah mambantu saya menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Semua saudara dan saudari saya (Ines dan suaminya, Fernando dan Istrinya, Jorge Borges dan istrinya, Aguida dan suaminya. Teresa dan Rosita serta Mariano dan Adolfo dan istrinya dan semua keponakan saya), dan saudara Simiao Ximenes Maia yang selama ini

selalu mendukung saya baik secara meterial dan moral serta motivasi yang luar biasa hingga saat ini saya bisa menyelesaikan tugas ini.

10. Untuk sahabatku tercinta Aquelina da Silva yang selama ini memberikan dukungan dan doa untuk penulis serta selalu setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
11. Sahabat Magister Ilmu hukum Atma Jaya: Imanuel Christo Masela, Abdul Gafur Retob, Richard Talubun, Simson Sarik, Mohammad Boinauw, Ade Jossy Devrido Tuasela dan Kaka Angela Pinto serta teman-teman Magister Ilmu Hukum Atma Jaya Program Pasca sarjana Angkatan 2019, yang telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran kepada saya dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan terkhususnya pada bidang ilmu hukum ketatanegaraan di Timor Leste.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
PENGESAHAN TESIS	III
MOTTO	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
ABSTRAK.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Hukum Tentang Negara	17
B. Pentingnya Hubungan Kekuasaan Dalam Negara Hukum.....	21
C. Sistem Pemerintahan Parlemen	24
D. Uraian Tentang Politik Hukum	26
E. Landasan Teori	30

1. Teori Negara Hukum	30
2. Teori Konstitusi	33
3. Teori Pembagian kekuasaan	40
BAB III CARA PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Data.....	43
C. Metode pengumpulan data	45
D. Lokasi penelitian	46
E. Analisis Data.....	47
F. Penarikan Kesimpulan	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pembahasan Umum Terkait Republik Demokrasi Timor Leste	48
1. Timor Leste dan Perjuangan Kemerdekaan	48
2. Letak Geografis dan Kehidupan Sosial Negara Timor Leste	49
3. Sejarah konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste.....	50
B. Hubungan kekuasaan antara Presiden dan Parlemen di Negara Republik Timor Leste.....	53
1. Hubungan Kekuasaan Secara Umum Dalam Konteks RDTL	53
2. Konsep kekuasaan Negara Hukum RDTL Menurut Konstitusi	56
3. Hubungan kekuasaan Presiden dan Parlemen dalam konstitusi	60
4. Tafsiran Semantik Presiden dan Parlemen terhadap Konstitusi.....	65
C. Implikasi Pembagian Kekuasaan Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.....	77

1. Konstitusi sebagai landasan Pembagian Kekuasaan.....	77
2. Implikasi Kekuasaan Pemerintahan Pada Konstitusi RDTL	82
D. Politik hukum pengaturan perimbangan kekuasaan Presiden dan parlemen dan konstitusi	84
1. Politik hukum konstitusi Timor Leste	84
2. Format baru kekuasaan dalam konteks negara hukum.....	87
3. Kewenangan Presiden yang dapat dihapus dan Dirubah.....	90
4. Kekuasaan Presiden dalam Hubungannya dengan parlemen tidak berjalan sesuai konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Kewenangan Presiden dan Parlemen Dalam Konstitusi RDTL	62
--	----



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. 1: Kekuasaan dalam Negara Hukum RDTL Menurut Konstitusi57
2. Gambar 1. 2 : Alur Pengangkatan Perdana Menteri Menurut Ketentuan Pasal 106 UUD RDTL.....68
3. Gambar 1. 3 : Format Baru Kekuasaan Presiden RDTL.....89



INTISARI

Konstitusi Demokratik Timor Leste telah mengatur bahwa hubungan kekuasaan Presiden dan Parlemen Nasional terletak pada fungsi kedua lembaga Negara yang sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara. Presiden diberikan tanggung jawab sebagai kepala Negara untuk mengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis, sementara Parlemen Nasional memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang hal-hal prinsipil menyangkut politik dalam dan luar negeri bangsa. Meskipun kekuasaan Presiden dan Parlemen Nasional sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara namun Presiden diberikan kewenangan secara konstitusi untuk dapat mengangkat anggota Pemerintah lainnya dari unsur Parlemen Nasional atas usulan dari Perdana Menteri. Pada sisi yang lain Perdana Menteri sudah mengusulkan sembilan orang anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional untuk diangkat oleh Presiden namun hingga sampai pada saat ini Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan pendekatan ketatanegaraan, tipe penelitian bersifat diskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan Presiden untuk tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya yang telah diusulkan oleh Perdana Menteri tersebut tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional, implikasi dari tindakan Presiden tersebut menyebabkan adanya hubungan kekuasaan Presiden dengan anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional di Negara Republik Demokratik Timur Leste tidak berjalan lancar. Dengan tidak diangkatnya sembilan orang anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional tersebut dapat menyebabkan adanya kekosongan jabatan serta pelaksanaan tugas anggota Pemerintah lainnya dari anggota Parlemen Nasional tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Tindakan Presiden untuk tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintahan lainnya tersebut juga menyebabkan adanya penyalanggunaan kekuasaan dan bertentangan dengan konstitusi RDTL. Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut maka sangat penting dibentuk norma hukum yang mengatur terkait sanksi hukum terhadap penyalanggunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden.

Kata Kunci : Konstitusi, Perimbangan, Presiden dan Parlemen Nasional.

ABSTRACT

The Democratic Constitution of Timor Leste has stipulated that the power relationship between the President and the National Parliament lies in the function of the two State institutions which both hold the State's sovereignty. The President is given the responsibility as head of state to regulate the running of democratic state administering institutions, while the National Parliament has the authority to make laws on principal matters relating to the nation's domestic and foreign politics. Although the powers of the President and the National Parliament are both holders of State sovereignty, the President is given the constitutional authority to be able to appoint other members of the Government from the National Parliament on the suggestion of the Prime Minister. On the other hand, the Prime Minister has proposed nine other members of the Government from the elements of the National Parliament to be appointed by the President but until now the President has not appointed the other nine members of the Government. The research method used is normative legal research. The approach in this research is a political-law approach and a constitutional approach, the type of research is descriptive analytical. The source of legal materials used is primary legal materials and secondary legal materials, data collection techniques through literature study and interviews, then analyzed through descriptions using qualitative methods.

Based on the results of the research that the President's policy not to appoint nine other members of the Government that had been proposed by the Prime Minister was not based on constitutional reasons, the implications of the President's actions led to a relationship between the President's power and other members of the Government from the elements of the National Parliament members in the Republic Democratic Timor Leste is not running smoothly. The absence of the appointment of the other nine members of the Government from the members of the National Parliament could lead to vacancies and the implementation of the duties of other members of the Government from the members of the National Parliament did not run smoothly as it should be. The President's action not to appoint nine members of the overmen also led to the abuse of power and contravened the RDTL constitution. In order to overcome these legal problems, it is very important in the form of legal norms that regulate legal sanctions against the abuse of authority carried out by the President.

Key words: Constitution, Balance, President and National Parliament.

ABSTRATO

A Constituição Democrática de Timor-Leste estipulou que a relação de poder entre o Presidente e o Parlamento Nacional reside na função das duas instituições do Estado que detêm a soberania do Estado. O Presidente tem a responsabilidade, como chefe de Estado, de regular o funcionamento das instituições democráticas de administração do Estado, enquanto o Parlamento Nacional tem autoridade para legislar sobre os principais assuntos relacionados com a política interna e externa da nação. Embora os poderes do Presidente e do Parlamento Nacional sejam ambos detentores da soberania do Estado, o Presidente tem autoridade constitucional para poder nomear outros membros do Governo do Parlamento Nacional por sugestão do Primeiro-Ministro. Por outro lado, o Primeiro-Ministro propôs nove outros membros do Governo entre os elementos do Parlamento Nacional a serem nomeados pelo Presidente, mas até agora o Presidente não nomeou os outros nove membros do Governo. O método de pesquisa utilizado é a pesquisa jurídica normativa. A abordagem desta pesquisa é uma abordagem político-jurídica e uma abordagem constitucional, o tipo de pesquisa é descritiva analítica. A fonte dos materiais jurídicos usados são os materiais jurídicos primários e os materiais jurídicos secundários, técnicas de coleta de dados por meio de estudo de literatura e entrevistas, depois analisados por meio de descrições usando métodos qualitativos.

Com base nos resultados da pesquisa de que a política do Presidente de não nomear outros nove membros do Governo proposta pelo Primeiro-Ministro não se baseava em razões constitucionais, as implicações das ações do Presidente conduziram a uma relação entre o poder do Presidente e outros membros do Governo dos elementos do Parlamento Nacional membros da República Democrática de Timor Leste não está a funcionar bem. A ausência da nomeação dos outros nove membros do Governo dos membros do Parlamento Nacional pode levar a vagas e a implementação das funções de outros membros do Governo a partir de membros do Parlamento Nacional não correu bem como deveria. estar. A ação do Presidente de não nomear os nove membros do Parlamento Nacional também resultou em abuso de poder e foi contra a constituição da RDTL. Para superar esses problemas jurídicos, é muito importante na forma de normas jurídicas que regulem as sanções legais contra os abusos de autoridade cometidos pelo Presidente.

Palavras-chave: Constituição, Balanço, Presidente e Parlamento Nacional.